

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Latif, dkk, *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2021.

Bambang Widjayanto, dkk, *Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU)*, Penerbit Mizan, Jakarta Selatan, 2010

Chandra M.Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.

Febrina Annisa dan Yetisma Saini, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2022.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, CV Haura Utama, Sukabumi, 2020.

Khoirul Hamim, *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram, 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, CV Amanah, Palembang, 2020.

Nursya A, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*, Alungadan Mandiri, Jakarta, 2020.

Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Salman Luthan, dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2014.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, *Hukum Pidana Korupsi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023.

Jurnal

Adawiyah, R. & Wulan, E.R., “Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Tersangka”, *IBLAM Law Review*, 4(1),

Andi, N.O., Hartono, B., & Ramadan, S., “Pertimbangan Hakim Praperadilan Terhadap Tidak Sahnya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN.Kbu)”, *REAL: Journal of Religion Accounting and Law*, 2 (1), 155-163, 2025

Andriyani, E.E., “Pandangan Hukum Islam Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Tinjauan Yuridis”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 30-44, 2022

- Arifin, A.I., “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Lex et Societatis*, III (1), 72-82, 2015
- Edyar, B., Hayati, I., Saputra, K., “Korupsi dalam Telaah Ayat Ahkam dan Hukum Positif Nasional (*Corruption in The Study of Ahkam Verses dan Nation Positive Law*)”, *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 7 (3), 641-657, 2023
- Kafara, S., “Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jkt Sel)”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1), 81-94, 2020
- Latif, A., “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum yang Adil”, 7(1), 50-85, 2010
- Marpaung, B., “Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nalar Keadilan*, 2(2), 12-28, 2022
- Matogu, F. & Rusmiati, E., “Prinsip *Due Process of Law* dalam Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mercatoria*, 16 (2), 192-200, 2023
- Monintja, E.S., “Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016”, *Lex Crimen*, IX (2), 97-105, 2020

- Nasution, R.P., dkk, “Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023”, *Jurnal Begawan Hukum*, 2(1), 117-128, 2024
- Pratiwi, N.A., “Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK Tanpa Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due Of Process”. *Jurnal Verstek*. 5 (3), 158-168, 2017
- Salmon, H.C.J., “Kata Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara”, *Matakoa: Corruption Law Review*, 1 (1), 19-27, 2023
- Saly, J.N., & Pratama, M.L., “Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPJ Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip *Due Process of Law Indonesia*)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2), 1625-1631, 2023
- Surya, R., “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”, *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 (2), 531-547, 2018
- Sutrisna, M.D, “Criminal Procedure Code: Application “*Due Process Of Law*”, 5 (2), 2023
- Tama. I,M, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, 1(1), 24-32, 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan
Kembali Putusan Praperadilan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 017/A/JA/07/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 039/A/JA/10/2010
tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016

Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Tte

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Tar

Internet

[Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini! - ACLC KPK](#) diakses pada 7 Januari 2025

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2> diakses pada 6 Januari 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-kerugian-keuangan-negara-dalam-kasus-korupsi-lt51fb46e7a8edc/> diakses pada 19 Maret 2025

https://www.kompasiana.com/sitinurulhayah0016/685f0a39c925c46ef30c9662/pera-n-asas-due-process-of-law-dalam-menjamin-keadilan-di-indonesia?page=all#goog_rewarded diakses pada 25 Juni 2025

<https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif->

[hukum-islam](#) diakses pada 5 Mei 2025

Hukum Perubahan. (2025). Anotasi Eksaminator Prof. Hanafi Amrani, SH., LLM.,

Ph.D., Atas Putusan Praperadilan Tom Lembong [Video], Youtube,

<https://youtu.be/WC7mCtJVhWQ?si=eXcBmkxaTiOp4806>

Revolusi Hukum. (2023, 17 Februari). 11.b. Penetapan Tersangka Sebagai Upaya

Paksa dari Penyidik [Video]. Youtube,

https://youtu.be/wXE_fhf_SY4?si=s4lw3jeeG6OeRYVS